

# Ombudsman Soroti Mandegnya Penetapan Anggota KI

SERANG, BANPOS - Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten menyoroti terkait dengan proses penetapan anggota Komisi Informasi (KI) di Provinsi Banten yang saat ini masih mandek di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Karena, hal tersebut menjadi suatu penghambat berjalannya pelayanan publik akan aktivitas keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Adriadi. Dirinya mengatakan, pi-

haknya mendorong agar DPRD Provinsi Banten segera memutuskan terkait hasil tes uji kelayakan (fit and proper) dan menyerahkannya kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten.

"Kita mendorong lah ya (kepada DPRD Provinsi Banten, red), karena kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Makanya jangan sampai itu jadi menghambat pelayanan publik untuk mendapatkan kepastian tentang informasi," kata Fadli kepada BANPOS, Minggu (11/2).

Fadli juga mengatakan, dengan telah berjalannya serangkaian proses seleksi, seharusnya DPRD Provinsi Banten dapat bergerak lebih cepat dalam melakukan penetapan dan mengambil keputusan.

Ia juga menuturkan, masyarakat yang ingin memanfaatkan informasi dari KI akan sangat dirugikan jika serangkaian proses seleksi anggotanya digantung hingga berlarut-larut.

"Saya nggak tahu itu nanti apakah persidangan tidak bisa dilakukan (jika ada masyarakat yang meminta informasi dan gugat informasi, red)? Kalau belum ditetapkan, setahu saya tidak bisa (dilakukan persidangan, red). Nah itu kan merugikan masyarakat. Makanya, kita mendorong lah agar secepatnya diputuskan, yang penting itu kan ada kepastian, dipastikan. Kan prosesnya sudah berjalan, jangan sampai mandek dan akhirnya merugikan masyarakat," tuturnya.

Fadli menjelaskan, DPRD Provinsi Banten harus segera menetapkan keputusan dan menyerahkan hasil keputusan tersebut kepada Pj Gubernur Banten.

"Apapun keputusan itu harus diambil, yang berbahaya itu kan putusannya tidak diambil atau di-

gantung. Makanya sekali lagi kami mendorong agar DPRD Provinsi Banten utamanya Komisi I untuk segera menetapkan anggota KI. Apapun keputusannya," ujarnya.

Lebih lanjut Fadli mengatakan, dengan belum ditetapkannya ang-

gota KI yang baru, maka pelayanan publik terkait permintaan informasi masyarakat menjadi terhenti. Sehingga, hal tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan spekulasi publik akan penetapan anggota KI. (MPD/AZM)

